

Peran Pemerintah Desa Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang

Imam Subata¹, Muhammad Nur Hidayat², Khudrotun Nafisah³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Sosiatri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul Ulum

Subata.imam@gmail.com

Abstract

Indonesia, as a country with cultural, religious, and ethnic diversity, faces major challenges in maintaining harmony amidst differences. Religious harmony is one of the important pillars in maintaining national stability. Government efforts, including at the village level, in promoting tolerance and harmony between religious communities are very important to prevent conflict and strengthening social cohesion. Likewise, the Ceweng village government has implemented various policies and programs that support religious harmony. The purpose of this study is to analyze and understand how the Ceweng Village government carries out its role in maintaining harmony between religious communities in the village. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data was obtained through in-depth interviews, observations, and document analysis. The results of the study indicate that the Ceweng Village government plays a central role in facilitating religious harmony through various policies, programs, and activities that involve all elements of society. The theory used in this study is the role theory by Biddle and Thomas, and also theory structural functional by Talcott Parsons. This study concludes that the active role of the Ceweng Village government, supported by community participation and collaboration with religious leaders, is a key factor in maintaining religious harmony in Ceweng Village. These findings contribute to the understanding of the important role of local government in promoting tolerance and harmony in diverse societies.

Keyword: Religious Harmony; Religious Conflict; Tolerance

Abstrak

Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya, agama, dan etnis menghadapi tantangan besar dalam menjaga kerukunan di tengah perbedaan. Kerukunan umat beragama menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional. Upaya pemerintah termasuk di tingkat desa dalam mempromosikan toleransi dan kerukunan umat beragama sangat penting untuk mencegah konflik dan memperkuat kohesi sosial. Begitu pula yang dilakukan oleh pemerintah desa Ceweng dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program yang mendukung kerukunan umat beragama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami bagaimana pemerintah Desa Ceweng menjalankan perannya dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Ceweng memainkan peran sentral dalam memfasilitasi kerukunan beragama melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran (*role theory*) oleh Biddle dan Thomas dan teori struktural fungsional milik Talcott Parsons. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran aktif pemerintah Desa Ceweng, didukung oleh partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan

tokoh agama, merupakan faktor kunci dalam menjaga kerukunan beragama di Desa Ceweng. Temuan ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang pentingnya peran pemerintah lokal dalam mempromosikan toleransi dan kerukunan dalam masyarakat yang beragam.

Kata kunci: Kerukunan Beragama; Konflik Beragama; Toleransi

PENDAHULUAN

Isu toleransi masih tetap menjadi penting dan relevan saat ini, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Globalisasi dan migrasi telah meningkatkan keragaman etnis, budaya, dan agama di banyak negara. Migrasi manusia dan meningkatnya interaksi global telah menyebabkan pertemuan antara berbagai kelompok budaya (Muharam, 2020). Perpindahan penduduk menyebabkan masyarakat multikultural tersebar di berbagai belahan dunia. Konflik yang berlatar belakang agama menuntut adanya toleransi di dalam masyarakat guna menghindari terjadinya konflik yang mengarah pada tindak anarkisme atau kekerasan yang mengatasnamakan agama (Said, 2012).

Menanamkan nilai-nilai toleransi pada generasi muda adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan damai di masa depan. Upaya penguatan nilai-nilai toleransi dan multikultural melalui pendidikan, diperlukan perubahan karakter dan perilaku dari masyarakat itu sendiri melalui pemahaman dari masing-masing tokoh agama dan tokoh masyarakat agar masyarakat dapat menjaga keseimbangan antar kehidupan beragama (Sakinah & Dewi, 2021). Oleh karena itu, penting untuk menerapkan sikap moderat dalam beragama dan menjaga keseimbangan masyarakat agar tetap berada di titik tengah guna menciptakan harmoni yang dampak positifnya akan terlihat dalam jangka waktu yang akan datang.

Upaya pemerintah termasuk di tingkat desa, dalam mempromosikan toleransi dan kerukunan umat beragama sangat penting untuk mencegah konflik dan memperkuat kohesi sosial. Di tingkat desa, peran pemerintah desa menjadi sangat vital dalam menjaga kerukunan umat beragama. Pemerintah desa sebagai institusi pemerintahan terdekat dengan masyarakat, memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan suasana harmonis dan toleran. Beberapa kajian telah dilakukan tentang peran pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama, meski banyak yang membahas di tingkat global namun konsepnya dapat diterapkan dalam konteks desa dalam penelitian ini.

Sebuah penelitian berfokus pada strategi yang digunakan oleh pemerintah desa untuk memelihara toleransi beragama. Strategi utama yang ditemukan termasuk penguatan peran lembaga adat, pelatihan pendidikan karakter di sekolah, dan keterlibatan aktif tokoh agama dalam pengambilan keputusan desa. Hasil penelitian menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan beberapa elemen masyarakat dalam menjaga kerukunan beragama (Susanto, 2017). Adapula hasil penelitian yang menunjukkan bahwa inisiatif-inisiatif seperti perayaan bersama hari besar agama dan diskusi rutin antar pemuka agama sangat efektif dalam mengurangi ketegangan dan meningkatkan toleransi (Octavia et al., 2022).

Terdapat penelitian lain yang mengkaji persepsi masyarakat desa terhadap upaya pemerintah desa dalam menjaga kerukunan umat beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki persepsi positif terhadap inisiatif

pemerintah desa, terutama dalam hal fasilitasi dialog dan mediasi konflik. Penelitian ini menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan warga untuk menjaga kerukunan beragama (Wibowo, 2019). Meskipun demikian masih terdapat beberapa celah penelitian (*research gaps*) yang belum sepenuhnya dijelajahi. Penelitian ini akan mencoba mengisi celah-celah tersebut dengan fokus yang lebih mendalam dan spesifik. Dengan mengidentifikasi dan mengisi celah-celah penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap pemahaman tentang peran pemerintah desa dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Dalam penelitian ini mengambil lokus penelitian di Desa Ceweng Kecatan Diwek Kabupaten Jombang. Alasan kuat yang mendasari yaitu pertimbangan keragaman agama, Desa Ceweng memiliki populasi dengan keragaman agama yang cukup signifikan, termasuk Islam dan Kristen, Budha dan Khonghucu. Keragaman ini menjadikan Desa Ceweng sebagai tempat yang tepat untuk mempelajari bagaimana kerukunan umat beragama dapat dijaga. Secara geografis letaknya juga berada diantara Kota Jombang dan Pondok Pesantren Tebuireng yang menjadikan desa ini memiliki keunikan tersendiri berkaitan dengan toleransi kehidupan beragama. Menarik pula untuk dikaji ketika Pemerintah Desa Ceweng berani menerima tawaran bantuan dari *The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints* (LDS Church), yang juga dikenal sebagai Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir atau Gereja Mormon.

Sementara desa yang lain menolak, dikarenakan isu keagamaan sangat sensitif, terutama respon dari kelompok garis keras. Namun tidak demikian dengan Desa Ceweng, yang tetap memilih untuk memberanikan diri untuk menerima bantuan dari LDS Church. Meski tidak dapat dihindari akan menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat, maka melalui penelitian ini akan diketahui upaya-upaya apa yang telah dilakukan pemerintah Desa Ceweng melewati tantangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian bagaimana peran pemerintah Desa Ceweng dalam menjaga kerukunan umat beragama di wilayahnya? Lalu apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan upaya pemerintah Desa Ceweng dalam menjaga kerukunan umat beragama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam menjaga kerukunan umat beragama, termasuk strategi-strategi yang digunakan, tantangan yang dihadapi, dan keberhasilan yang telah dicapai. Dengan memahami peran dan upaya pemerintah desa, diharapkan dapat ditemukan model-model dan praktik terbaik yang bisa diterapkan di desa-desa lain untuk menjaga kerukunan umat beragama.

Metode

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan data-data yang ditemukan di lapangan mengenai tema penelitian ini (Sugiyono, 2013). Data-data hasil survei lalu akan dikenai pendekatan kualitatif berbentuk deskriptif yang akan menjelaskan dan menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan bersifat induktif, yaitu menggunakan analisis model Milles dan Huberman yang terdiri dari *data reduction*, *display*, dan *conclusion*.

Dalam penarikan kesimpulan ini penulis menuliskan kesimpulan dari data yang diberikan oleh informan mengenai peran Peran Pemerintahan Desa Ceweng dalam menjaga dan merawat kerukunan beragama, sehingga hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam Pemerintahan Desa Ceweng dan Masyarakat Desa Ceweng dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan untuk menjaga kerukunan beragama di wilayah Desa Ceweng.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori struktural fungsional milik Talcott Parsons, yang berusaha menjelaskan pentingnya peran setiap bagian masyarakat dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas keseimbangan sosial. Ditambahkan juga peneliti menggunakan teori peran (*role theory*) milik Biddle dan Thomas, yaitu seorang *actor* harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh tersebut diharapkan dapat berperilaku dan bertindak secara tertentu. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran Pemerintah Desa Ceweng dalam menjaga kerukunan umat beragama di Desa Ceweng Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa Ceweng dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama

Desa Ceweng, yang terletak di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, adalah sebuah desa yang memiliki karakteristik sosial dan budaya khas pedesaan Jawa Timur. Desa Ceweng merupakan contoh desa yang mempertahankan nilai-nilai tradisional dan budaya lokal di tengah perubahan jaman. *Background* agama masyarakat di Desa Ceweng adalah agama Islam (mayoritas), kristen, katolik, budha, dll. Desa Ceweng dikenal sebagai komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan dan toleransi antarumat beragama. Bantuan yang diberikan oleh *The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints* (LDS Church) mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat dan pemerintah Desa Ceweng ketika banyak desa-desa lain yang menolak. LDS Church atau yang lebih dikenal dengan Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Akhir Zaman, telah banyak melakukan kegiatan sosial kemanusiaan termasuk bantuan bencana, program pemberantasan kemiskinan, dan proyek kesehatan dan pendidikan.

Respon terhadap LDS Church sangat beragam, mencerminkan spektrum luas dari keyakinan dan pengalaman individu dan kelompok. Dari pandangan teologis yang kritis hingga kolaborasi sosial yang positif, LDS Church menghadapi berbagai tanggapan yang mencerminkan kompleksitas interaksi agama dalam masyarakat modern. Masyarakat Desa Ceweng menerima bantuan dari LDS Church dengan tangan terbuka. Bantuan yang diberikan, seperti sumbangan barang-barang kebutuhan pokok, alat kesehatan, dan bantuan pendidikan, dianggap sangat bermanfaat dan membantu meningkatkan kesejahteraan warga desa. Warga menyambut baik niat tulus LDS Church dalam memberikan bantuan tanpa memandang perbedaan agama. Contoh tanggapan dari salah satu warga Desa Ceweng, Evi Muflihatul Habibah:

"Kami sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh LDS Church. Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama di masa sulit seperti sekarang. Ini menunjukkan bahwa kepedulian tidak mengenal batas agama."

Bantuan dari LDS Church tidak hanya membawa manfaat material, tetapi juga memperkuat kerukunan dan solidaritas antarumat beragama di Desa Ceweng. Warga

merasa bahwa bantuan ini adalah bukti nyata dari semangat saling membantu dan bekerja sama dalam keberagaman. Hal ini mendorong warga untuk lebih aktif dalam berbagai kegiatan yang mempromosikan kerukunan umat beragama. Warga Desa Ceweng mengapresiasi inisiatif LDS Church yang menunjukkan bahwa perbedaan agama bukanlah halangan untuk berbagi dan membantu sesama. Masyarakat desa menjadi lebih terbuka dan menghargai kontribusi dari berbagai pihak, termasuk dari agama yang berbeda. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu tokoh dari agama Islam di Desa Ceweng, Bapak Aris Hermawan:

"Bantuan ini menunjukkan bahwa kita bisa saling membantu tanpa melihat perbedaan. Kami sangat menghargai kontribusi LDS Church dan ini semakin memperkuat hubungan antar umat beragama di desa kami."

Kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian nasional. Kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan Pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rusydi, 2018). Melalui contoh yang ada di Desa Ceweng ini dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Ceweng juga memberikan dukungan penuh dengan memastikan bantuan dari LDS Church diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh warga.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan umat beragama. Peran ini meliputi fasilitasi dialog antar umat beragama, mediasi konflik, serta implementasi kebijakan yang mendorong toleransi dan saling menghormati. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan, termasuk kerukunan umat beragama. Pemerintah desa dapat mengadakan kegiatan bersama seperti gotong royong, perayaan hari besar keagamaan, dan dialog antar tokoh agama untuk mempromosikan toleransi. Menurut UU No. 1 / PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, kerukunan beragama mencakup beberapa aspek penting seperti toleransi, saling menghargai, komunikasi yang baik, dan kerja sama antar umat beragama untuk mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan masyarakat.

Komponen utama dalam kerukunan beragama adalah toleransi yaitu sikap saling menghormati dan menerima perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan di antara masyarakat. Toleransi memungkinkan setiap individu untuk menjalankan ibadah dan kepercayaan mereka tanpa gangguan atau diskriminasi. Kerukunan umat beragama merupakan kondisi dimana berbagai kelompok agama hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan berinteraksi secara harmonis. Menurut Sururin (dalam Karda, 2018), kerukunan beragama mencakup tiga dimensi: kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas sosial dan mencegah konflik yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Membahas kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, di Desa Ceweng pemerintah desa telah mengambil peran yang cukup baik dalam memastikan kerukunan beragama di dalam wilayahnya. Hal tersebut sesuai dengan pengertian teori peran (*role play*) milik Biddle dan Thomas, yaitu apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Dalam seni peran, seorang *actor* harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu (Soerjono &

Budi, 2014)). Hal tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh Ahmadi (2005) bahwa peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Syukur (2011) juga berpendapat peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.

Di dalam penelitian ini, peran pemerintah Desa Ceweng dalam menjaga kerukunan umat beragama tidak terlepas karena fungsi sosial dan tanggung jawab sosial yang diamanatkan atau yang diharapkan ada pada pemerintah desa untuk dapat bersikap bijak, menjaga perdamaian dan keamanan wilayahnya, melalui upaya-upaya yang menjunjung tinggi toleransi, saling menghargai, komunikasi yang baik, dan kerja sama antar umat beragama di wilayah Desa Ceweng. Sesuai dengan teori peran ini maka harapan-harapan peran pemerintah Desa Ceweng yang menuntun perilaku, sikap dan kebijakan yang diambil dalam upaya menjaga kerukunan.

Pemerintah Desa selain bertugas untuk menjalankan administrasi pemerintahan, juga memiliki fungsi dan tugas utama lainnya seperti pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Membina dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan desa, seperti pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan agama. Pemberdayaan adalah mengembangkan potensi ekonomi dan sumber daya manusia di desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut dapat dilihat dari peran pemerintah desa dalam upaya pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan pemerintah desa dapat bertanggung jawab dalam pengelolaan dana dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Peran pemerintah desa tersebut, dibuktikan di Desa Ceweng dengan bantuan yang diterima dari LDS Church dapat diterima dan dikelola dengan baik sehingga mampu memberikan manfaat dan distribusi yang tepat sasaran bagi masyarakat Desa Ceweng. Pemerintah desa juga memanfaatkan momen ini untuk menggalang kerjasama lebih erat dengan berbagai komunitas agama lain di desa Ceweng. Seperti yang disampaikan oleh Ketua BPD, Bapak Edi Purwanto:

"Kami sangat mendukung dan berterima kasih atas bantuan dari LDS Church. Kerjasama seperti ini sangat penting untuk membangun desa yang harmonis dan sejahtera. Kami akan terus mendorong inisiatif-inisiatif serupa di masa depan."

Tidak dapat dipungkiri bantuan dari LDS Church membantu pemerintah Desa Ceweng dalam mencapai tujuan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial warga dengan menyediakan kebutuhan dasar dan dukungan pendidikan. Selain itu bantuan dari LDS Church berfungsi sebagai katalisator untuk meningkatkan integrasi sosial dan memperkuat ikatan antar umat beragama di Desa Ceweng. Bantuan ini juga dapat memperkuat semangat gotong royong di antara warga desa, mendorong mereka untuk bekerja sama dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa bantuan LDS Church kepada Desa Ceweng merupakan sebuah contoh keberhasilan di berbagai sektor, baik di bidang ekonomi, sosial dan agama.

Analisis Teori Struktural Fungsional dalam Melihat Upaya Pemerintah Desa Ceweng

Dalam bukunya yang berjudul *The Social System* (1951), Talcott Parsons memiliki kontribusi penting terhadap teori struktural fungsional yaitu teori yang berusaha menjelaskan bagaimana berbagai bagian dalam masyarakat dapat bekerja sama dalam menjaga stabilitas dan ketertiban (Umanailo, 2019). Parsons

memperkenalkan *AGIL Framework* (*Adaptation, Goal Attainment, Integration* dan *Latency*) dalam menganalisis fungsi-fungsi utama dari setiap sistem sosial. *Adaptation* (adaptasi): sistem harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal. *Goal Attainment* (pencapaian tujuan): sistem harus menetapkan dan mencapai tujuan. *Integration* (integrasi): sistem harus mengoordinasikan bagian-bagian yang berbeda sehingga dapat bekerja sama secara harmonis. *Latency* (pemeliharaan pola): sistem harus mempertahankan dan memelihara norma serta nilai budaya.

Teori struktural fungsional Talcott Parsons menekankan pada pentingnya struktur sosial dan fungsi-fungsi yang mendukung keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat. Dalam melihat upaya pemerintah desa dalam menjaga kerukunan umat beragama di Desa Ceweng, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur dan fungsi sosial bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah hasil analisis penelitian menggunakan *AGIL Framework* dalam teori struktural fungsional Parsons: 1) *Adaptation*, merujuk pada kemampuan sistem sosial dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal. Pemerintah Desa Ceweng menunjukkan adaptasi yang baik dalam menjaga kerukunan umat beragama melalui kebijakan dan regulasi yang diterapkan. Contoh implementasinya yaitu, pemerintah Desa Ceweng mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) tentang tata cara pelaksanaan kegiatan keagamaan untuk mengatur agar semua umat beragama dapat menjalankan ibadah mereka dengan aman dan nyaman tanpa mengganggu satu sama lain.

2) *Goal attainment* (pencapaian tujuan), pemerintah Desa Ceweng menetapkan tujuan kolektif menjaga kerukunan umat beragama sebagai prioritas utama. Contoh implementasinya pemerintah Desa Ceweng mendukung segala kegiatan keagamaan dengan menyediakan beberapa fasilitas dan dukungan dana dalam perayaan hari besar agama, serta mengadakan acara yang melibatkan berbagai umat beragama seperti forum dialog antar umat beragama. 3) *Integration*, mengacu pada kemampuan sistem sosial dalam menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Pemerintah Desa Ceweng memainkan peran penting dalam mengintegrasikan berbagai kelompok agama. Contoh implementasinya adalah pemerintah Desa Ceweng mengadakan seminar, lokakarya dan kegiatan bersama dalam meningkatkan pemahaman dan toleransi antar umat beragama.

4) *Latency* (pemeliharaan pola) berkaitan dengan pemeliharaan nilai-nilai budaya dan norma yang mendukung fungsi sistem sosial. Contoh implementasinya adalah pemerintah Desa Ceweng bertindak sebagai mediator dalam konflik yang melibatkan unsur agama, dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Dengan demikian, berdasarkan analisis dengan menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons, peran pemerintah Desa Ceweng dalam menjaga kerukunan umat beragama dapat dilihat sebagai upaya yang holistik dan sistematis dalam memenuhi fungsi-fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Sehingga beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah Desa Ceweng dapat dikatakan berhasil dalam memberikan kontribusi pada terciptanya masyarakat yang harmonis dan stabil serta mampu menjaga kerukunan umat beragama.

Indikator keberhasilan upaya pemerintah desa dalam menjaga kerukunan beragama meliputi beberapa hal, seperti: minimnya insiden konflik antaragama dalam lima tahun terakhir, tingginya partisipasi warga dalam kegiatan keagamaan bersama,

dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap upaya pemerintah desa dalam menjaga kerukunan beragama. Sebagai contoh selama perayaan Idul Fitri dan Natal tahun 2023, pemerintah Desa Ceweng mengadakan acara buka puasa bersama dan perayaan Natal bersama di aula desa. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat dan berlangsung dengan damai serta penuh kebersamaan. Ini menunjukkan keberhasilan pemerintah desa dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan inklusif.

Walaupun demikian, masih terdapat tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Desa Ceweng seperti: 1) Faktor internal, yaitu beberapa perangkat desa merasa kesulitan dalam melaksanakan tugas karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya pelatihan mengenai mediasi konflik; 2) Faktor eksternal, yaitu pengaruh berita negatif di media sosial dan provokasi dari kelompok tertentu dapat memicu ketegangan antar umat beragama di desa yang selama ini sudah berjalan damai dan rukun. Guna mengantisipasi hambatan tersebut, maka diperlukan strategi terkait peningkatan kapasitas aparatur desa.

Pemerintah Desa Ceweng telah merencanakan adanya pelatihan khusus bagi aparatur desa terkait manajemen konflik dan mediasi konflik agama. Selain itu juga melakukan penguatan jaringan dan kerjasama dengan lembaga keagamaan serta organisasi masyarakat dalam mendukung program kerukunan umat beragama. Pemerintah desa harus berperan aktif dalam mengatasi ketegangan atau konflik yang muncul antarumat beragama. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan dialog, mediasi, dan kegiatan bersama yang memperkuat ikatan sosial. Setiap kali terjadi perubahan atau gangguan dalam kerukunan, pemerintah desa harus selalu melakukan penyesuaian kebijakan dan program untuk mengembalikan keseimbangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan beberapa poin yang dianggap sesuai dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. *Pertama*, pemerintah Desa Ceweng khususnya melalui peran kepala desa, memiliki beberapa inisiatif dan strategi dalam menjaga kerukunan umat beragama di wilayahnya seperti: membangun forum dialog antar umat beragama, mengadakan kegiatan sosial bersama, dan memberikan penyuluhan atau pendidikan toleransi. *Kedua*, masyarakat Desa Ceweng umumnya memiliki persepsi positif terhadap upaya pemerintah desa dalam menjaga kerukunan umat beragama. Kepala Desa Ceweng dianggap oleh warga sebagai sosok figur yang netral dan berkomitmen menjaga kerukunan sehingga masyarakat mau secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa Ceweng.

Ketiga, faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan upaya pemerintah Desa Ceweng. Faktor pendukung meliputi beberapa hal seperti: 1) Kepemimpinan yang inklusif dan proaktif dalam menyatukan berbagai kelompok agama; 2) Adanya dukungan dari tokoh agama yang berpengaruh di desa turut memperkuat upaya pemerintah Desa Ceweng dalam menjaga kerukunan beragama; 3) Partisipasi warga yang cukup tinggi sehingga terlihat adanya peningkatan interaksi dan pemahaman antar umat beragama. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: 1) Perbedaan kepentingan antar kelompok sehingga mampu memicu ketegangan; 2) Pengaruh isu-isu eksternal atau nasional yang dapat mempengaruhi kerukunan umat beragama di tingkat lokal; 3) Keterbatasan sumber daya baik dalam hal dana maupun

fasilitas sehingga kurang memaksimalkan program-program yang telah disusun oleh pemerintah Desa Ceweng.

Dari pelaksanaan penelitian ini, maka dapat disarankan agar semakin memperkuat forum dialog antar umat beragama dengan melibatkan banyak pihak (generasi muda atau tua, baik laki-laki maupun perempuan) sehingga dapat memperluas jaringan partisipasi kerukunan beragama. Meningkatkan pendidikan toleransi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Hal-hal tersebut dapat didukung dengan menggali support pihak eksternal baik dari pemerintah maupun non-pemerintah (NGO) sebagai sumber daya tambahan baik secara materi maupun moril dalam mendukung program kerukunan beragama di Desa Ceweng.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, D., & Nuraini, A. (2005). Teori Penjulukan. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6(2), 297–306.
- A. Susanto. (2017). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- C. Wibowo: (2019). Strategi Pemerintah Desa dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Sosiologi*.
- Habibah, E. M. (2024). Wawancara Pribadi.
- Hermawan, A. (2024). Wawancara Pribadi.
- Karda, I. M. (2018). *Kerukunan Inter Maupun Antar Umat Beragama* (p. 13).
- Muharam, R. S. (2020). Membangun Toleransi Umat Beragama di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo. *Jurnal HAM*, 11(2), 269.
- Octavia, I., Harsan, T., & Fatimah, S. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa Singodutan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri *Jurnal Prgdi PPKn, FKI Univet Bantara Sukoharjo Bekerja Sama Dengan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Jawa Tengah*, 4, 95–105.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. Psychology Press.
- Purwanto, E. (2024). Wawancara Pribadi.
- Rusydi, I., & Zolehah, S. (2018). Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian. *Journal for Islamic Studies*, 1(1), 170–181.
- Said, Z. (2012). Konflik Sosial Keagamaan Islam Non-Mainstream Dalam Masyarakat Majemuk Di Indonesia. *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 419–436.
- Sakinah, R. N., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Karakter Dasar Para Generasi Muda Dalam Menghadapi Era Revolusi Industrial 4.0. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 152–167.
- Soerjono, S., & Budi, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar: Cetakan ke-46*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Umanailo, M. C. B. (2019). Talcot Parson and Robert K Merton. *Researchgate.Net*, October, 1–5. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9pmt3>